

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
GRABAG KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Rosalina Deviyanti

3121 31877

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ROSALINA DEVIYANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 312131877

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

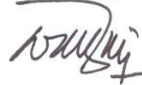
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Manggar Wulan Kusuma, S.E., M.Si., Ak.

Penguji



Wing Wahyu Winarno, Dr., M.A.F.I.S., Ak., CA.

Yogyakarta, 16 Juni 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

Rosalina Deviyanti

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281
Email: rosalinadeviyanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi, SPIP, Partisipasi, Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

Membangun Indonesia melalui daerah pinggiran ialah gerakan yang dilakukan untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan pembenahan melalui bagian pinggiran yaitu desa melalui penyuguhan anggaran desa. Anggaran desa disajikan pada konteks menumbuhkan perataan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjabarkan bahwasanya cita-cita pembangunan desa adalah menumbuhkan kemakmuran desa serta mutu hidup individu serta mengatasi kemiskinan dengan pencapaian keperluan dasar, pembangunan sarana serta prasarana desa, peningkatan peluang ekonomi lokal, serta penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) serta lingkungan dengan berkesinambungan. Dana desa dianggarkan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan ke setiap kabupaten atau kota.

Tahun 2015 adalah awal dimulainya dana desa, dimana besarnya alokasi dana desa dari tahun 2015 sampai 2021 terus mengalami kenaikan dan tahun 2021 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Kenaikan dana desa merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Berikut total dana desa dari tahun 2015-2023:

Tabel 1. 1 Total Dana Desa 2015-2023

Tahun	Total Dana Desa
2015	20,7 Triliun rupiah
2016	46,7 Triliun rupiah
2017	59,8 Triliun rupiah
2018	59,9 Triliun rupiah
2019	69,8 Triliun rupiah
2020	71,2 Triliun rupiah
2021	72,0 Triliun rupiah
2022	68,0 Triliun rupiah
2023	70,0 Triliun rupiah

Sumber: DJP KEMENKEU

Semakin besarnya dana desa, maka desa harus memiliki kesiapan dalam mengelola dana desa secara baik dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa dalam mengelola dituntut untuk memperhatikan aspek tata pemerintah yang optimal (*good governance*) yakni satu diantara landasannya merupakan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal penting bagi aparatur desa karena menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal krusial bagi aparatur desa karena menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mempunyai definisi yang lumayan luas mencakup tanggung jawab,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penyuguhan, pemberian laporan serta pengemukakan semua agent kepada principal (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas pada Pemerintah Desa yang telah dikemukakan oleh Sumpeno dalam Putu (2020) mengatakan terdapatnya partisipasi kewenangan oleh Pemerintah Desa untuk melangsungkan tanggung jawab terhadap pencapaian kegiatan oleh kegiatan pada pengelolaan dana desa yang dilaksanakan serta terdapat kaitan erat terhadap konteks pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan korupsi, maka Pemerintah Desa harus memahami akuntabilitas dengan baik untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus tindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, dengan sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 Miliar (databoks.katadata.co.id, 2022). Tahun 2022 terdapat kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo. Penyalahgunaan tersebut antara lain: pengadaan 20 mesin serit padi untuk warga yang sudah dirembug namun tidak dilaksanakan, upah padat karya 50 juta yang tidak diberikan, modal BUMDes sebesar 20 juta yang tidak diberikan, pembangunan pengurugan jalan usaha tani dan pembuatan irigasi yang tidak selesai, dana penanganan Covid-19 tidak dipergunakan. Perkiraan total korupsi mencapai 400 juta (detik.com, 2023).

Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah khususnya dalam lingkup desa untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa, maka pengkajian ini bermaksud guna menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang dimiliki aparatur desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas dana desa dapat berjalan maksimal. Kompetensi yang dimiliki aparatur desa sangat krusial hubungannya dengan pengelolaan dana desa, yang kemudian berpengaruh terhadap pembangunan desa. Kompetensi berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana sumber daya manusia yang tinggi didalam organisasi tertentu akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa wajib mempunyai

keterampilan optimal guna bisa mengatur serta bertanggungjawab dengan dana desa sebab aparatur desa yang berkompeten mengelola keuangan desa dapat menumbuhkan akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa itu, serta sebaliknya (Enggar, Anita dan Suhendro, 2020). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa (Puspa dan Prasetyo, 2020). Disisi lain ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian Indrawarsi dan Faktor kedua yaitu pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi diperlukan oleh aparatur desa untuk membuat atau mengelola dokumen-dokumen desa secara efisien dan efektif. Penelitian Indrawarsi dan Rahayu (2020), Aziiz dan Prasiti (2019) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Lain halnya dengan Enggar, Anita dan Suhendro, (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pengendalian internal ialah teknik guna mengarahkan, mengawasi serta menaksir sumber daya sebuah organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah merupakan sistem pengontrolan intern yang dirancang seluruhnya pada lingkungan pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah. Penelitian Dewi dan Julianto (2020), Aziiz dan Prasiti (2019) mengemukakan bahwasanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pengelolaan akuntabilitas dana desa. Berbeda dengan Pahlawan et al (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntabilitas dana desa.

Faktor keempat adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program pembangunan ataupun pengembangan masyarakat. Penelitian terdahulu Pahlawan et al (2020), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan Rahayu dan Indraswari (2021), Thatok dan Asmoy (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, banyaknya dana desa yang diberikan pemerintah dari masa ke masa, dan keberagaman penelitian sebelumnya maka penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh dari kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul penelitian: “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo”.

II. LANDASAN TEORI

Teori keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) ialah korelasi antara *principal* dan *agent*. Teori ini menjabarkan tentang korelasi kerja antara pihak pemberi kuasa (*principal*) dan pihak penerima kuasa (*agent*). Teori agensi mempunyai asumsi bahwa setiap individu hanya terdorong atas keperluannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Terkait dengan hubungannya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah perangkat desa sebagai pihak yang diberi kuasa (*agent*) oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (*principal*) guna mengelola dana desa. Masyarakat dalam hal ini juga merupakan *principal*, sehingga Pemerintah Desa harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kepada masyarakat (Gayatri & Dewi, 2019).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik ialah suatu jasa yang terdiri atas menotulensi, menggolongkan, serta melaporkan transaksi yang melahirkan sebuah informasi keuangan yang akan diperlukan kelompok tertentu guna pemerolehan ketetapan, yang diaplikasikan dalam pengelolaan dana publik dilembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang dinaunginya (Sujarweni, 2022).

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengelolaan Dan Desa

Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 mengemukakan bahwasanya, “Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilaksanakan guna mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat serta penyelenggaraan kebijakan yang dipercayakan kepada aparatur desa dalam mencapai cita-cita yang telah ditentukan (Pahlawan et al, 2020).

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Havesi dalam Aprilia & Fitria (2020) kompetensi adalah ciri khas yang dimiliki individu seperti wawasan, keterampilan, keahlian pada penyelenggaraan sebuah tugas. Tingkat kompetensi bisa diukur berlandaskan latar belakang akademik, pelatihan juga keahlian yang dipunya. Kompetensi ialah suatu keterampilan guna melakukan atau menyelenggarakan sebuah tugas yang didasari dari kepiawaian serta wawasan yang disokong oleh perilaku kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Agustiningsih et al., 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi”.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilaksanakan dengan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Partisipasi Masyarakat

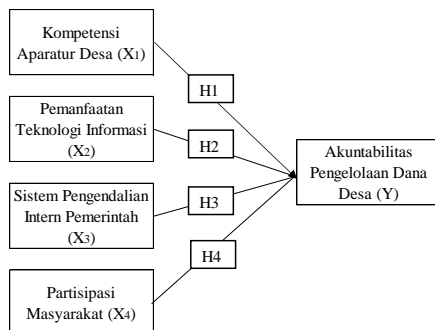
Partisipasi masyarakat sangat penting bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa (Apriliya dan Fitria, 2020). Sedangkan, menurut Atininsih (2019) ialah satu diantara aspek yang mempengaruhi kesuksesan operasi pembangunan dan pengembangan masyarakat desa.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dimulai di Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 dengan lokasi penelitian Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dari 32 desa yang berada di wilayah Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Purposive Sampling*, kriteria sampel pada penelitian ini adalah seseorang yang memiliki jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Desa,
2. Sekretaris Desa,
3. Kepala Urusan Keuangan,
4. Kepala Urusan Perencanaan,
5. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari instrumen berbentuk kuesioner. Data penelitian ini didapat dengan melakukan survey yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada perangkat desa yang berada di Kecamatan Grabag. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:



IV. Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum

Kecamatan Grabag adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi

Jawa Tengah. Kecamatan Grabag memiliki luas wilayah 64 km² dengan total 32 Desa. Berikut data desa yang berada di Kecamatan Grabag:

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Aglik	17	Nambangan
2	Bakurejo	18	Pasaranom
3	Banyuyoso	19	Patutrejo
4	Bendungan	20	Rejosari
5	Dudukulon	21	Rowodadi
6	Duduwetan	22	Roworejo
7	Dukuhdungus	23	Sangubanyu
8	Grabag	24	Sumberagung
9	Harjobinangun	25	Tegalrejo
10	Kalirejo	26	Tlepokkulon
11	Kedungkamal	27	Tlepokwetan
12	Kertojayan	28	Trimulyo
13	Kese	29	Tulusrejo
14	Ketawangrejo	30	Tunggulrejo
15	Kumpulrejo	31	Ukirsari
16	Munggangsari	32	Wonoenggal

Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dengan total penyebaran sebanyak 160 responden dengan tingkat pengembalian yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	160	100%
Kuesioner tidak kembali	5	3%
Kuesioner kembali	155	97%
Kuesioner tidak dapat diolah	2	1%
Kuesioner yang dapat diolah	153	96%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 160 buah atau 100% kuesioner yang di sebar, kuesioner kembali sebanyak 155 buah atau 97%. Kuesioner tidak kembali sebanyak 5 buah atau 3%. Pada saat proses pengolahan data sebanyak 2 buah kuesioner atau sebesar 15 tidak dapat diolah karena pengisian kuesioner tersebut tidak lengkap, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 153 buah atau 96%.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kelompok, yaitu menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan masa kerja

	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	125	81.70%
	Perempuan	28	18.30%
Usia	<30	17	11.11%
	31-40	30	19.61%
	41-50	55	35.95%
	51-60	44	28.76%
	>60	7	4.58%
Jenjang Pendidikan	SD	0	0.00%
	SMP	5	3.27%
	SMA/SMK	101	66.01%
	D3	17	11.11%
	S1	29	18.95%
	S2	1	0.65%
Jabatan	S3	0	0.00%
	Kepala Desa	31	20.26%
	Sekretaris Desa	31	20.26%
	Kepala Urusan Keuangan	30	19.61%
	Kepala Urusan Perencanaan	31	20.26%
Masa Kerja	Kepala Tatausaha dan Umum	30	19.61%
	<1 tahun	1	0.65%
	1-5 tahun	40	26.14%
	5-10 tahun	57	37.25%
	10-15 tahun	29	18.95%
>15 tahun	26	16.99%	

Berlandaskan tabel diatas diketahui bahwasannya dari 153 responden jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 125 individu atau 81.70% dan sisanya 28 individu untuk kategori perempuan atau 18.30%. Selanjutnya yaitu karakteristik responden dengan jenis usia yakni yang berusia kurang dari 30 tahun berjumlah 17 orang atau 11.11%, untuk responden yang memiliki usia antara 31 sampai 40 tahun berjumlah 30 orang atau 19.61%, untuk responden yang berusia antara 41 sampai 50 tahun berjumlah 55 orang atau 35.95%, untuk responden yang berusia antara 51 sampai 60 tahun berjumlah 44 orang atau 28.76%, dan untuk responden yang berusia lebih dari 60 tahun berjumlah 7 orang atau 4.58%. Kategori pendidikan jumlah responden paling banyak dalam kategori jenjang pendidikan adalah SMA/SMK sebesar 66.01%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa yang menempati kedudukan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, Kepala Perencanaan dan Kepala Tata Usaha dan Umum berpendidikan terakhir SMA/SMK. Berdasarkan kategori jabatan responden dalam penelitian yaitu Kepala Desa berjumlah 31 orang atau 20.26%, Sekretaris Desa berjumlah 31 orang atau 20.26%, Kepala Keuangan berjumlah 30 orang atau 19.61%, Kepala Perencanaan berjumlah 31 orang

atau 20.26% dan Kepala Tata Usaha dan Umum berjumlah 30 orang atau 19.61%. Berdasarkan lama pengalaman kerja didapatkan hasil bahwa responden dengan pengalaman kerja dibawah 1 tahun berjumlah 1 atau 0.65%, untuk 1 sampai dengan 5 tahun berjumlah 40 atau 26.14%, untuk 5 sampai 10 tahun berjumlah 57 atau 37.25%, untuk 10 sampai 15 tahun berjumlah 29 atau 18.95%, dan untuk lebih dari 15 tahun berjumlah 26 atau 16.99%.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Kompetensi Aparatur Desa (X₁), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X₃), Partisipasi Masyarakat (X₄). Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Berikut merupakan tabel hasil dari uji statistik deskriptif:

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kompetensi Aparatur Desa	153	18	28	23,59	2,437
Pemanfaatan Teknologi Informasi	153	22	36	28,93	3,282
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	153	25	36	29,62	2,746
Partisipasi Masyarakat	153	27	36	31,20	2,594
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	153	16	24	19,63	2,121

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai N yang sama yaitu 153. Variabel kompetensi aparat desa memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3,45 dengan standar deviasi sebesar 0,022. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3,32 dengan standar deviasi sebesar 0,043. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3,23 dengan standar deviasi sebesar 0,043. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 34, nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3,27 dengan standar deviasi sebesar 0,047. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3,25 dengan standar deviasi sebesar 0,039. Seluruh nilai standar deviasi lebih kecil

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari nilai rata-rata memiliki arti bahwa penyebaran data baik atau penyimpangan rendah.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Uji validitas diukur dengan nilai signifikansi dibawah 0.05 atau r hitung $>$ r tabel. Berikut merupakan tabel hasil uji validitas data:

Variabel	Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.1	0,718	0,1587	Valid
	X1.2	0,520		Valid
	X1.3	0,777		Valid
	X1.4	0,794		Valid
	X1.5	0,632		Valid
	X1.6	0,704		Valid
	X1.7	0,726		Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	0,718	0,1587	Valid
	X2.2	0,634		Valid
	X2.3	0,804		Valid
	X2.4	0,763		Valid
	X2.5	0,722		Valid
	X2.6	0,566		Valid
	X2.7	0,767		Valid
	X2.8	0,740		Valid
	X2.9	0,709		Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X3)	X3.1	0,537	0,1587	Valid
	X3.2	0,664		Valid
	X3.3	0,643		Valid
	X3.4	0,475		Valid
	X3.5	0,737		Valid
	X3.6	0,746		Valid
	X3.7	0,674		Valid
	X3.8	0,471		Valid
	X3.9	0,689		Valid
Partisipasi Masyarakat(X4)	X4.1	0,650	0,1587	Valid
	X4.2	0,733		Valid
	X4.3	0,554		Valid
	X4.4	0,190		Valid
	X4.5	0,650		Valid
	X4.6	0,733		Valid
	X4.7	0,603		Valid
	X4.8	0,733		Valid
	X4.9	0,603		Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	X3.1	0,690	0,1587	Valid
	X3.2	0,793		Valid
	X3.3	0,803		Valid
	X3.4	0,740		Valid
	X3.5	0,721		Valid
	X3.6	0,764		Valid

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah,

partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan memperoleh nilai r hitung $>$ r tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner dari variabel kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Perhitungan yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah menggunakan *Cronbach's Alpha*, variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap suatu pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,782	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,832	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,813	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,811	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,839	Reliabel

Berdasarkan hasil uji pada tabel dapat dilihat pada variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,782. Pemanfaatan teknologi informasi memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,832. Sistem pengendalian intern pemerintah memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,813. Partisipasi masyarakat memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,811. Sedangkan variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,839. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Maka, dapat diartikan bahwa seluruh instrumen angket bersifat reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* adalah apabila nilai signifikansi $>$ 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi $<$ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Unstandardized Residual	Keterangan
N	153	Normal
Signifikansi	0,109	

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa uji normalitas memperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,109 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji regresi bebas dari masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk menguji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* $< 0,1$ dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel Independen	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur Desa	0,223	4,491
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,583	1,716
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,601	1,663
Partisipasi Masyarakat	0,270	3,707

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai *tolerance* $> 0,10$. Sedangkan untuk nilai VIF, setiap variabel memperoleh nilai < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dan dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glesjer*. Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam uji ini apabila nilai Sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai Sig. $< 0,05$

maka data mengalami heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel Independen	Sig.
Kompetensi Aparatur Desa	0,058
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,741
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,287
Partisipasi Masyarakat	0,192

Dapat dilihat bahwa data variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai Sig. $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan pengaruh yang timbul dari indikator variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk menguji variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Unstandardized Coefficients	t	Sig	Keterangan
	B			
Konstanta (α)	5,742	2,987	0,003	
Kompetensi Aparatur Desa	0,285	2,364	0,019	H1 Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,089	1,609	0,110	H2 Ditolak
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,273	4,185	0,000	H3 Diterima
Partisipasi Masyarakat	-0,112	-1,090	0,277	H4 Ditolak
F Hitung	21,271			
Adj R Square	0,348			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) sebesar 5,742. Nilai konstanta (α) pada variabel kompetensi aparatur desa ($\beta_1 X_1$) adalah 0,285, nilai konstanta (α) pada variabel pemanfaatan teknologi informasi ($\beta_2 X_2$) adalah 0,089, nilai konstanta (α) pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah ($\beta_3 X_3$) adalah 0,273, dan nilai konstanta (α) pada variabel partisipasi masyarakat ($\beta_4 X_4$) adalah sebesar (-0,112). Maka, model persamaan regresi linear

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berganda yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,742 + 0,285X_1 + 0,089X_2 + 0,273X_3 - 0,112X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
X_1	= Kompetensi Aparatur
X_2	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_3	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
X_4	= Partisipasi Masyarakat
e	= error

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar 5,742 yang menyatakan apabila nilai variabel kompetensi aparatur desa (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), sistem pengendalian intern pemerintah (X_3), dan partisipasi masyarakat (X_4) diabaikan atau sama dengan 0 (nol), maka nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) masih tetap sebesar 5,742.

2. Koefisien kompetensi aparatur desa (β_1)

Nilai koefisien variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,285 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan akuntabilitas dana desa, maka setiap kenaikan variabel kompetensi aparatur desa sebesar 1% akan menaikkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 28,5%.

3. Koefisien pemanfaatan teknologi informasi (β_2)

Nilai koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,089 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan akuntabilitas dana desa, maka setiap kenaikan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1% akan menaikkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,9%.

4. Koefisien sistem pengendalian intern pemerintah (β_3)

Nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,273 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dengan akuntabilitas dana desa, maka setiap kenaikan

variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 1% akan menaikkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 27,3%.

5. Koefisien partisipasi masyarakat (β_4)

Nilai koefisien variabel partisipasi masyarakat sebesar -0,112 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak searah dengan akuntabilitas dana desa, maka setiap kenaikan variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 1% akan menurunkan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 11,2%.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah seluruh variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah apabila nilai *p-value* (Sig.) < 0,05 (5%), atau F hitung > F tabel maka model yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan. Hasil uji F adalah sebagai berikut:

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249,505	4	62,376	21,271	0,000
	Residual	433,998	148	2,932		
	Total	683,503	152			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) dan nilai F hitung sebesar 21,271 lebih besar dari F tabel sebesar 2,34 (F hitung 21,271 > F tabel 2,34). Hal ini menandakan bahwa model dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan.

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati satu maka kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Sedangkan apabila angka koefisien determinasi (R^2) kecil maka kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen terbatas. Besarnya kemampuan variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	,604	,365	,348	1,712

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,356 atau 35,6%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 35,6%, atau model penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel maksimal sebesar 35,6%.

Uji t

Uji t digunakan sebagai bukti pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji t adalah apabila tingkat signifikansi $< 0,05$, atau t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Sedangkan, apabila tingkat signifikansi $> 0,05$, atau t hitung $< t$ tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Variabel	Unstandardized Coefficient	t	Sig	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur Desa	0,285	2,364	0,019	H1: Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,089	1,609	0,110	H2: Ditolak
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,273	4,185	0,000	H3: Diterima
Partisipasi Masyarakat	-0,112	-1,090	0,277	H4: Ditolak

Berdasarkan tabel hasil uji t, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi kompetensi aparatur desa (X_1) sebesar $0,019 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,364 > 1,97612$ (t tabel). Dengan demikian kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini memperoleh beta positif sebesar $0,285$ artinya variabel kompetensi

aparatur desa H1 diterima, yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi (X_2) sebesar $0,110 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,609 < 1,97612$ (t tabel). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini memperoleh beta positif sebesar $0,089$ artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis (H_2) yang berbunyi "Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa" ditolak.
3. Nilai signifikansi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_3) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,185 > 1,97612$ (t tabel). Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini memperoleh beta positif sebesar $0,273$ artinya variabel sistem pengendalian internal pemerintah H3 diterima, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Nilai signifikansi partisipasi masyarakat (X_4) sebesar $0,277 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,112 < 1,97612$ (t tabel). Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini memperoleh beta negatif sebesar $-0,112$ artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis (H_2) yang berbunyi "Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa" ditolak.

Variabel Yang Paling Berpengaruh

Variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Standardized Coefficients	T	Sig
	Beta		
Kompetensi Aparatur Desa	0,328	2,364	0,019
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,138	1,609	0,110
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,353	4,185	0,000
Partisipasi Masyarakat	-0,137	-1,090	0,277

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Standardized Coefficients Beta* tertinggi adalah 0,353 yaitu variabel sistem pengendalian intern pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan oleh pemerintah sudah bagus. Sistem pengendalian intern pemerintah telah berhasil dilaksanakan dalam pengawasan terhadap aparatur desa. Selanjutnya yang memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* yang tinggi adalah variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,328. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa berkompeten. Aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi memudahkan dalam proses pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas dana desa menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil diperoleh dari uji t dimana koefisien nilai beta positif sebesar 0,285, nilai koefisien sebesar $0,019 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,364 > 1,97612$ (t tabel) maka H1 terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa aparatur desa di desa seKecamatan Grabag memiliki kemampuan yang baik serta dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Kompetensi aparatur pengelola dana desa merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjaga tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Novanti, 2022).

Agency Theory dalam penelitian ini terbukti, dimana akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat). Semakin bagus kualitas kompetensi aparatur pengelola dana desa, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka semakin tinggi kemampuan pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) dan (Azizz & Prastiti, 2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik, para pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan dana desa, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Setyowati, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas dana desa menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil diperoleh dari uji t dimana koefisien nilai beta positif sebesar 0,089, nilai koefisien sebesar $0,110 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,609 < 1,97612$ (t tabel) maka H2 tidak terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa aparatur desa di desa seKecamatan Grabag kurang memahami pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman teknologi yang digunakan aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Selain itu dapat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pemanfaatan teknologi. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pahlwan et al.,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2020) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian (Indraswari, 2021) yang menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntabilitas dana desa. Teknologi informasi merupakan faktor yang penting bagi semua orang dalam memudahkan pekerjaannya sehingga kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa. Pengolahan laporan keuangan dana desa akan memiliki efisiensi waktu, akurat, dan semakin transparan jika memanfaatkan teknologi informasi dengan baik (Pahlawan et al., 2020)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan akuntabilitas dana desa menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil diperoleh dari uji t dimana koefisien nilai beta positif sebesar 0,275, nilai koefisien sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,185 > 1,97612$ (t tabel) maka H1 terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa aparatur desa di desa seKecamatan Grabag memiliki sistem pengendalian intern pemerintah yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aziiz & Prastiti, 2019) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menyatakan bahwa, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik pengendalian internal yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan organisasi maka akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dicapai dengan dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor penting karena adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (Ramadhai, 2022).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis (uji t) mengenai pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas dana desa menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil diperoleh dari uji t dimana koefisien nilai beta negatif sebesar -0,112, nilai koefisien sebesar $0,277 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,090 < 1,97612$ (t tabel) maka H4 tidak terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi masyarakat dengan aparatur desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliya & Fitria, 2020) bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari peneliti sebelumnya (Setyowati et al., 2020) dan (Mada, et al., 2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab (Medianti, 2018).

V. Simpulan Dan Saran Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka simpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi aparatur desa yang baik dan memadai dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bermutu.
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini dapat disebabkan oleh masih banyaknya aparatur desa yang belum mengerti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan laporan keuangan.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang layak dalam penyelenggaraan kegiatan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara masyarakat dengan aparatur desa.

5. Variabel yang memiliki pengaruh terbesar adalah variabel sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur desa telah terlaksana dengan baik.

Keterbatasan

1. Jumlah responden yang hanya 153 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini hanya meneliti aparatur desa di Kecamatan Grabag pada tahun 2023.
3. Rendahnya koefisien determinasi yaitu hanya sebesar 35,6% menunjukkan bahwa ke empat variabel independen dalam penelitian ini belum secara maksimal menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik.
2. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat memperluas subyek yang diteliti, agar hasil penelitian yang diperoleh lebih menyeluruh.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya pada saat akan melakukan penelitian menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Daftar Pustaka

Agustiningih, M., Taufik, T., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh *Good Governance* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris pada desa di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia. Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91.

Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–2.

rifiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82.

Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 1–12.

Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1(1), 1–15.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344

Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298.

Dewi, P.A.D.R., & I. Putu. J. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*. 11(2). 281-292.

Fatkhurrokhim. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Skripsi. Program Sarjana Akuntansi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Sembawa. *Jurnal Akademik Akuntansi*. 2(1). 106-123.
- Fortuna, Fitria. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Pada Desa di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Skripsi. Program Sarjana Akuntansi. Universitas PGRI. Yogyakarta.
- Maulana, S. W., & Napisah, L. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(1), 427–443.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bayat). *Jom Feb*, 1(1), 1–13.
- Ghozali, I., & Anis, C. (2014). Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Novanti, E. & Fatchur, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*. 5(1). 1-18.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. databoks.katadata.co.id. Diakses 10 Februari 2023.
- Novitasari, & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–16.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Lutfhiani, B.M. & Thatik, A. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*. 30(7). 1886-1899.
- Periansya, & Sopiyan, A. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1–8
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”*, 8(2), 106–115.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100.
- Martini et al. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan
- Rasimi, N. K., & I. Made. Y. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. 28(1), 132-158.

Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342

Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon. (2020). Antecedent akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65.

Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.

Sugiyono. (2021). Statistik Untuk Penelitian. ALFABETA.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Sujarweni, V. W. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.

Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan. (2020). Pustaka Mahardika.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.